

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak bisa dipungkiri salah satunya didorong oleh sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang meningkatnya pendapatan daerah. Sampai tahun 2013, sektor pertanian menyumbang 14,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku. Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian masih dengan posisi terbesar yaitu mampu menyerap 38,07 juta orang atau 34,6 persen tenaga kerja dari 100 juta angkatan kerja nasional (BPS, 2014).

Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Indonesia memiliki potensi yang besar sekali di dalam setiap subsektor pertaniannya, salah satunya sektor perkebunan. Perkebunan memiliki arti penting, terutama di negara berkembang yang selalu berupaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Selain itu, subsektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerima devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Agribisnis Tanaman Perkebunan, 2008 : 6).

Guna mendorong sektor riil perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Komoditi yang diprioritaskan pada program ini adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Alasan diprioritaskan ketiga komoditi ini karena ketiga komoditi tersebut memiliki peranan strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja baru. Ketiga komoditi ini mempunyai prospek pasar, baik didalam negeri maupun di ekspor (Dirjen Perkebunan, 2007).

Keberadaan pembangunan untuk suatu daerah memiliki peluang besar. Sektor perkebunan ini cenderung konsekuen didalam pertumbuhannya, baik itu dari segi wilayah maupun produksinya. Subsektor pertanian yang satu ini bisa bertahan meskipun sedang terjadi keadaan krisis ekonomi. Berdasarkan peluang inilah pemerintah mengembangkan potensi perkebunan. Bisa dilihat sebagian besar wilayah Indonesia memiliki perkebunan, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Perkebunan diusahakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat, untuk itu perlu koordinasi antara pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk berperan serta di berbagai sektor. Hal ini juga bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Peran swasta sangat diharapkan terutama untuk pembangunan di bidang-bidang yang menjadi pemicu untuk menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan pendapat masyarakat (Sinulingga, 2009).

Selain itu, program pengembangan perkebunan di Indonesia salah satunya dikenal dengan pola PIR. Ditetapkannya Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dalam pengembangan perkebunan, diharapkan dapat memperkecil perbedaan yang ada antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Dalam hal ini teknologi pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran dapat dihilangkan. Dalam pola ini terdapat perusahaan inti yang membangun usaha dan fasilitas petani plasma, mengolah dan memasarkan hasil produksi petani plasma. Petani plasma berkewajiban mengelola usahanya dengan sebaik-baiknya, menjual hasil kepada perusahaan inti, dan membayar hutang yang telah dibebankan kepadanya. Pola PIR ini sudah banyak diterapkan dalam pengembangan perkebunan, persusuan, perunggasan dan perikanan. Selain PIR, program pengembangan perkebunan lainnya adalah pola Anak Angkat Bapak Angkat (ABA) yang sekarang sedang diterapkan dalam usaha skala kecil. (Wahyuningsih, 2007).

Salah satu strategi untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat, adalah dengan pola kemitraan. Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga

pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan dan harus ada kesepakatan misi, visi dan tujuan yang sama (Maulidah, 2010).

Program pengembangan masyarakat (Community Development/CD) merupakan salah satu program yang mampu meminimalkan konflik antara masyarakat dan pengusaha perkebunan kelapa sawit, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengusaha perkebunan kelapa sawit harus mau dan mampu menjalankan program ini. Salah satu program CD adalah melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitar dan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Pardamean, 2011 : 77).

Perusahaan berperan dalam mengelola kebun mitra dan inti secara penuh (*Full Manage*) dalam satu manajemen<sup>1</sup>. Perusahaan dan koperasi menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu Surat perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Bupati. Lahan kemitraan/plasma yang di atasnamakan Koperasi dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dalam 1 HGU koperasi tidak dapat diperjualbelikan oleh anggotanya. Dengan terbangunnya kebun kemitraan yang berstatus HGU, maka penghasilan Anggota Koperasi akan merata tanpa memandang lokasi/letak kebun (Pardamean, 2011 : 82).

Pada esensinya kemitraan adalah gotong royong yang diharapkan mampu menjawab cita-cita untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong yang dibentuk antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar dan kemampuan

---

<sup>1</sup> Satu manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik mitra usaha maupun milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas dan kesinambungan usaha (Pardamean, 2011 : 82).

teknologinya bersama petani golongan lemah yang kurang berpengalaman (Maulidah, 2010).

Tujuan akhir dari kemitraan ini adalah meminimalkan konflik, serta meningkatkan produktivitas dan usaha atas kepentingan bersama. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dianggap sebagai usaha yang menguntungkan, terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Disamping swasta pelaku ekonomi lainnya yang diharapkan berperan serta dalam pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara dan usaha kecil/koperasi. Ketiga pelaku ekonomi ini memang diisyaratkan sebagai Tri Tunggal pelaku pembangunan seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 (Sinulingga, 2009).

Di Provinsi Sumatera Barat salah satu pola Kemitraan antara Perkebunan Besar dengan Perkebunan Rakyat pola PIR KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) atau ABA (Anak Angkat Bapak Angkat) telah dilaksanakan di Pesisir Selatan. Pola kemitraan ini merupakan kerjasama yang dibentuk oleh perusahaan dengan koperasi setempat dimana di dalamnya tergabung para petani. Koperasi<sup>2</sup> merupakan suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Pelaksanaan pola kemitraan perkebunan ditekankan pada pembangunan yang berpihak terhadap rakyat kecil. (Fay, Dr 1980).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti pelaksanaan kerjasama antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi perkebunan plasma milik masyarakat setempat pola kemitraan.

---

<sup>2</sup> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No.25 tahun 1992).



## **B. Perumusan Masalah**

Pola kemitraan di Sumbar sudah dimulai sejak tahun 1986 dengan berbagai pola seperti PIR Trans berdasarkan Kepres No.1, PIR KKPA berdasarkan keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 atau kemitraan yang sering disebut dengan pola Anak Angkat Bapak Angkat (ABA). Kemitraan antara PT.Incasi Raya Group dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Warga di Pesisir Selatan telah dilaksanakan pada tahun 2005. Dalam pelaksanaan program kemitraan, petani yang tergabung dalam koperasi dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan mitra usaha PT.Incasi Raya Group. Konsep kemitraan menjadi salah satu program kerjasama antara perusahaan dengan koperasi, juga menjadi tanggung jawab sosial bagi perusahaan terhadap lingkungannya. Peran koperasi yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta pelaksanaan kemitraan. Dalam pelaksanaan kemitraan timbul hubungan timbal balik antara perusahaan dengan koperasi tersebut. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kemitraan ini dan sejauh mana keberhasilannya sesuai peraturan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan masalah atau konflik antara perusahaan dengan koperasi. Untuk itu peneliti disini ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait hal yang telah dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pola Kemitraan antara Perkebunan Besar PT.Incasi Raya sebagai Bapak Angkat dengan Koperasi Serba Usaha Bina Warga sebagai Anak Angkat di Pesisir Selatan?
2. Faktor apa yang mendorong dan menghambat keberhasilan pelaksanaan kemitraan antara PT.Incasi Raya unit Pesisir Selatan dengan Koperasi Serba Usaha Bina Warga?
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Serba Usaha Bina Warga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan perkebunan rakyat PT.Incasi Raya Pola PIR ABA di Pesisir Selatan
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara PT.Incasi Raya dengan koperasi di Pesisir Selatan
3. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Serba Usaha Bina Warga

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pembangunan perkebunan dimasa yang akan datang.
2. Memberikan pengetahuan tentang pembangunan perkebunan pola kemitraan, dan menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis atau lanjutannya.

